

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGERA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 39 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENETAPAN KELAS JABATAN
 DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

REKAPITULASI
 KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH ...

No.	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
1	2	3
1	Tanpa Kelas	
2	Tanpa Kelas	
3	17	
4	16	
5	15	
6	14	
7	13	
8	12	
9	11	
10	10	
11	9	
12	8	
13	7	
14	6	
15	5	
16	4	
17	3	
18	2	
19	1	
Total		

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/
 WALIKOTA

Tanda Tangan

NAMA

Catatan: Diserahkan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 39 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENETAPAN KELAS JABATAN

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH ...

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Kepala ...	Tanpa Kelas		
2	Wakil Kepala ...	Tanpa Kelas		
3	Sekretaris Jenderal ...	17		
4	Kepala Biro ...	15		
5	Kepala Bagian ...	11		
6	Kepala Subbagian ...	9		
7			

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA

Tanda Tangan
 NAMA

Catatan: Diserahkan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 39 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENETAPAN KELAS JABATAN

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH ...

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Analisis Kepegawaian Pertama				
2	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan				
3	Analisis Kepegawaian Pelaksanaan				
4	Auditor Madya				
5	Auditor Muda				
6				
7				

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA

Tanda Tangan
 NAMA

Catatan: Diserahkan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI
PELAYANAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN NILAI-JALURAN

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN ...

NOMOR	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	FAKTOR 1 RUANG LINGKUP + DAMPAK (1-5)	FAKTOR 2 PENGATURAN ORGANISASI (1-3)	FAKTOR 3 WEWENANG PENYELIAAN & MANAJERIAL (1-3)	FAKTOR 4 HUBUNGAN PERSONAL		FAKTOR 5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN (1-6)	FAKTOR 6 KONDISI LAIN (1-6)
							SIFAT HUB. (1-4)	TUJUAN HUB. (1-4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kepala ...	Tinggi Kelas								
2	Wakil Kepala ...	Tanpa Kelas								
3	Sekretaris Jenderal ...									
4	Kepala Biro ...									
5	Kepala Bagian ...									
6	Kepala Subbagian ...									

MENTERI/KEPALA GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA

Tanda Tangan
NAMA

Catatan: Diserahkan dalam bentuk Harcopy dan Scifcopy

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 39 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENETAPAN KELAS JABATAN

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA
 DI LINGKUNGAN ...

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	Faktor 1 Pengetahuan (Level 1~9)	Faktor 2 Pengawasan (Level 1~6)	Faktor 3 Pedoman (Level 1~5)	Faktor 4 Kompleksitas (Level 1~6)	Faktor 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1~6)	Faktor 6 Hub. Pribadi (Level 1~4)	Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1~4)	Faktor 8 Tuntutan Fisik (Level 1~3)	Faktor 9 Faktor Kerja Lingkg. Kerja (Level 1~3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Analisis Kepegawaian Pertama												
2	Analisis Kepegawaian Pelaksanaan Lanjutan												
3	Analisis Kepegawaian Pelaksanaan												
4	Auditor Madya												
5	Auditor Muda												
6	Auditor Pertama												
7												
8													

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

Tanda Tangan
 NAMA

Catatan: Diserahkan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy

Lampiran 1

Surat MenPANRB Validasi Hasil Evaluasi
Jabatan

No.: B/ /M.PANRB/.../20...

Tanggal

REKAPITULASI
KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH ...

No.	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
1	2	3
1	Tanpa Kelas	
2	Tanpa Kelas	
3	17	
4	16	
5	15	
6	14	
7	13	
8	12	
9	11	
10	10	
11	9	
12	8	
13	7	
14	6	
15	5	
16	4	
17	3	
18	2	
19	1	
Total		

a.n. Menteri
 Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi
 Deputi Men.PANRB
 Bidang SDM Aparatur,

Tanda Tangan
 NAMA

Lampiran 2

**Surat MenPANRB Validasi Hasil
Evaluasi Jabatan**

No.: B/ /M.PANRB/.../20...

Tanggal

**DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN, DAN
PERSEDIAAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH ...**

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Kepala ...	Tanpa Kelas		
2	Wakil Kepala ...	Tanpa Kelas		
3	Sekretaris Jenderal ...	17		
4	Kepala Biro ...	15		
5	Kepala Bagian ...	11		
6	Kepala Subbagian ...	9		
7			

a.n. Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
Deputi Men.PANRB
Bidang SDM Aparatur,

Tanda Tangan

NAMA

Lampiran 5
 Surat MenPANRB Validasi Hasil Evaluasi Jabatan
 No.: B/ /M.PAN-RB/.../20...
 Tanggal

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA
 DI LINGKUNGAN ...

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	Faktor 1 Pengetahuan (Level 1-9)	Faktor 2 Pengawasan (Level 1-5)	Faktor 3 Pedoman (Level 1-5)	Faktor 4 Kompleksitas (Level 1-6)	Faktor 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1-6)	Faktor 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)	Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	Faktor 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)	Faktor 9 Lingk. Kerja (Level 1-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Analisis Kepegawain Pertama												
2	Analisis Kepegawain Pelaksanaan Lanjutan												
3	Analisis Kepegawain Pelaksanaan												
4	Auditor Madya												
5	Auditor Muda												
6	Auditor Pertama												
7												
8													

a.n. Menteri
 Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi
 Deputi Men.PANRB
 Bidang SDM Aparatur,
 Tanda Tangan
 NAMA

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

Lambang Negara

Nomor : B/ /M.PANRB/.../20... ... 20...
Lampiran : 5 (lima) daftar
Hal : **Validasi Hasil Evaluasi Jabatan
di Lingkungan Instansi ...**

Yth. **Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota ...**
di
Tempat

Sesuai dengan usulan Saudara dalam surat nomor: ..., tanggal ..., perihal Usulan Validasi Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan ..., setelah dilaksanakan rapat pembahasan pada tanggal ... yang dihadiri oleh Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Negaradengan ini disampaikan validasi hasil evaluasi jabatan di Lingkungan ...sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,

tanda tangan

NAMA

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

PERATURAN MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...,

- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota ... tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi...;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Validasi Hasil Evaluasi Jabatan Nomor Tanggal ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ... TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN ...

Pasal 1

Kelas Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, dan Jabatan lainnya di lingkungan... ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran VPeraturan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota ... ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota... ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota ... ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia/Berita Daerah ...

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA...

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA...

tanda tangan

NAMA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA/BERITA DAERAH ... TAHUN ... NOMOR

...

Lampiran 1
Peraturan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota ...
Nomor ... Tahun ...

REKAPITULASI
 KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH ...

No.	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
1	2	3
1	Tanpa Kelas	
2	Tanpa Kelas	
3	17	
4	16	
5	15	
6	14	
7	13	
8	12	
9	11	
10	10	
11	9	
12	8	
13	7	
14	6	
15	5	
16	4	
17	3	
18	2	
19	1	
Total		

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA

Tanda Tangan
 NAMA

Lampiran 2

Peraturan Menteri/Kepala/
Gubernur/ Bupati/Walikota ...
Nomor ... Tahun ...

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN, DAN
PERSEDIAAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH ...

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Kepala ...	Tanpa Kelas		
2	Wakil Kepala ...	Tanpa Kelas		
3	Sekretaris Jenderal ...	17		
4	Kepala Biro ...	15		
5	Kepala Bagian ...	11		
6	Kepala Subbagian ...	9		
7			

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/
WALIKOTA

Tanda Tangan

NAMA

Lampiran 3
Peraturan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota ... Nomor ... Tahun ...

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH ...

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Analisis Kepegawaian Pertama				
2	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan				
3	Analisis Kepegawaian Pelaksanaan				
4	Auditor Madya				
5	Auditor Muda				
6				
7				

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

Tanda Tangan
NAMA

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL
 DI LINGKUNGAN ...

NOMOR	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	FAKTOR 1 RUMAH SANGKUT (1-5)	FAKTOR 2 PENGALIHAN KELOMPOK (1-3)	FAKTOR 3 WADANG PENEJAJAN (1-3)	FAKTOR 4 JURUSAN PERSONAL		FAKTOR 5 KESULTAN PERAKRAPAN PEKERJAAN (1-5)	FAKTOR 6 KONDISI (1-5)
							FAKTOR 4 1-4	FAKTOR 4 5-9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kepala ...	Tanpa Kelas								
2	Wakil Kepala ...	Tanpa Kelas								
3	Sekretaris Jenderal ...									
4	Kepala Biro ...									
5	Kepala Bagian ...									
6	Kepala Subbagian ...									

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

Tanda Tangan
 NAMA

Lampiran 5
Peraturan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota ... Nomor ... Tahun ...

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA
DI LINGKUNGAN ...

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	Faktor 1 Pengalaman (Level 1-9)	Faktor 2 Pengawasan (Level 1-9)	Faktor 3 Pedoman (Level 1-9)	Faktor 4 Kompleksitas (Level 1-6)	Faktor 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1-6)	Faktor 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)	Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	Faktor 8 Tuntutan Fisik (Level 1-5)	Faktor 9 Lingk. Kerja (Level 1-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Analisis Kepegawaian Pertama												
2	Analisis Kepegawaian Pelaksanaan Lanjutan												
3	Analisis Kepegawaian Pelaksanaan												
4	Auditor Madya												
5	Auditor Muda												
6	Auditor Pertama												
7												
8													
9													

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

Tanda Tangan
NAMA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

Lambang Negara

KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...

Nomor ... Tahun ...

TENTANG

KELAS JABATAN DAN PEMANGKU JABATAN DI LINGKUNGAN ...

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...

- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor ... Tahun ... tentang Mekanisme Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota ... tentang Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan Di Lingkungan ...;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor ... Tahun ... tentang Mekanisme Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota Nomor ... Tahun ... tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan ...;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA TENTANG KELAS JABATAN DAN PEMANGKU JABATAN DI LINGKUNGAN ...**
- KESATU** : Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatandi lingkungan Kementerian/Lembaga/... ditetapkan sebagaimana dalam daftar terlampir padaKeputusan Menteri/Kepala/ Gubernur/Bupati/Walikota ... ini.
- KEDUA** : Keputusan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota... ini berlaku sejak tanggal

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA...

tanda tangan
NAMA

Lampiran
Keputusan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota ... Nomor ... Tahun ...

DAFTAR NAMA JABATAN, KELAS JABATAN, DAN PEMANGKU JABATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH ...

No.	Nama Jabatan	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Pemangku Jabatan			Keterangan
				Nama	NIP	Pangkat/ Golongan	
1	2	3	4	5	6	7	8

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA

Tanda Tangan
NAMA

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

Lambang Negara

Nomor : B/ /M.PANRB/.../20... ... 20...
Lampiran : 5 (lima) daftar
Hal : **Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan
di Lingkungan Instansi ...**

Yth. **Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota ...**

di

Tempat

Sesuai dengan usulan Saudara dalam surat nomor: ..., tanggal ..., perihal Usulan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan *di Lingkungan ...*, setelah dilaksanakan rapat pembahasan pada tanggal ... yang dihadiri oleh Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Negaradengan ini disampaikan persetujuan perubahan hasil evaluasi jabatan di *Lingkungan ...*sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Deputi Men.PANRB
Bidang SDM Aparatur,
tanda tangan
NAMA

Tembusan:

3. Menteri PANRB;
4. Menteri Keuangan;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

LAMPIRAN X
 PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 39 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENETAPAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

Lambang Negara

PERATURAN MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...
 NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
 ... NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI

...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...

- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan Peraturan Menteri/Kepala/ Gubernur/Bupati/Walikota ... Nomor ... Tahun ... tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi...;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi smengenai Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan Nomor.... Tanggal ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ... TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ... NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN ...

Pasal 1

Kelas Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, dan Jabatan lainnya di lingkungan... ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Menteri/Kepala/ Gubernur/ Bupati/Walikota ... ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota... ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Kepala/ Gubernur/ Bupati/Walikota ... ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia/Berita Daerah ...

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/
WALIKOTA...

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA...

tanda tangan

NAMA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA/BERITA DAERAH ... TAHUN ... NOMOR ..

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

Lambang Negara

KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
... NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KELAS JABATAN DAN PEMANGKU JABATAN
DI LINGKUNGAN ...

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...

- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota ... tentang Perubahan Keputusan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota ... Nomor ... Tahun ... Tentang Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan Di Lingkungan ...;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor ... Tahun ... tentang Mekanisme Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota Nomor ...Tahun...tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan..;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/... TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ... NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KELAS JABATAN DAN PEMANGKU JABATAN DI LINGKUNGAN ...
- KESATU** : Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan di lingkungan Kementerian/Lembaga/... ditetapkan sebagaimana dalam daftar terlampir pada Keputusan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota ... ini.
- KEDUA** : Keputusan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota... ini berlaku sejak tanggal

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA...

tanda tangan
NAMA